SKRIPSI

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI TINGGINYA JUMLAH TENAGA KERJA ILEGAL KE MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Imelda Yulianti

E1031211079

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI TINGGINYA JUMLAH TENAGA KERJA ILEGAL KE MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Imelda Yulianti
NIM. E1031211079

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si
NIP. 196905021998022001

Tanggal: 26 Juni 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP. 198805072014041002

Tanggal: 12 Juni 2025

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENGATASI TINGGINYA JUMLAH TENAGA KERJA ILEGAL KE MALAYSIA DI KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
Imelda Yulianti
NIM. E1031211079

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Senin / 28 Juli 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang 3

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si
NIP. 196905021998022001

Sekretaris

Bima Sujendra, S.IP, M.Si
NIP. 198805072014041002

Penguji Utama

Dr. Dedi Kusnadi, M.Si
NIP. 196105261987031006

Penguji Pendamping

Indah Sulisdiani, SH, M.Si
NIP. 196512122007102001

Disahkan Oleh :
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah tenaga kerja ilegal di Kabupaten Sambas. Alasan peneliti melakukan penelitian karena masih banyak ditemukan masyarakat asal Kabupaten Sambas yang bekerja ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Mengingat bahwa banyaknya bahaya yang dapat terjadi apabila bekerja tanpa prosedur. Kesimpulan dari penelitian yaitu 1) Peran pemerintah sebagai regulator, pemerintah telah membuat aturan yang menjelaskan tugas dan fungsi dinas dalam mengatur permasalahan TKI yaitu pada Peraturan Bupati No 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tetapi dinas belum membuat program yang terstruktur terkait koordinasi dengan pihak lain untuk melakukan pengawasan berkala terhadap keberangkatan TKI ilegal di Kabupaten Sambas. 2) Peran pemerintah sebagai dinamisator, sejauh ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas, tetapi sosialisasi belum efektif untuk menggerakkan masyarakat agar berhenti memilih bekerja sebagai TKI ilegal. 3) Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sejauh ini telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi, tetapi pemanfaatan ini masih terbatas di satu platform saja dan perlu ditingkatkan ke berbagai platform serta melakukan pengawasan dengan pihak lain untuk memantau perekrutan oleh calo TKI di media sosial.

Kata kunci: Peran; Transmigrasi; TKI; TKI Ilegal

ABSTRACT

The purpose of this study is to outline and evaluate the Manpower and Transmigration Office's involvement in tackling Sambas Regency's high rate of illicit labor. The researcher undertook this study because many people from Sambas Regency continue to work in Malaysia through illicit means. Considering the potential dangers that can emerge when operating without following the right procedures. The study's findings are as follows: 1) The government's role as a regulator; the government has issued regulations that explain the agency's duties and functions in regulating migrant worker issues, specifically Regent Regulation No. 84 of 2021 concerning the position, organizational structure, duties, functions, and work procedures of the Sambas Regency Manpower and Transmigration Office. However, the agency has yet builded a structured program for coordinating with other parties to perform regular monitoring of the departure of illegal migrant workers in Sambas Regency. 2) The government's position as dynamizer. In the meantime, the Manpower and Transmigration Office has undertaken outreach in all subdistricts of Sambas Regency; still, it has not been successful in persuading the people to quit working as illegal migrants.3) The government's role as a facilitator: The government has used social media as a source of information, but this use is limited to one platform and should be expanded to include multiple platforms, as well as supervision with other parties to monitor recruitment by migrant worker brokers on social media.

Keywords: Transmigration; Migrant Workers; Illegal Migrant Workers.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengatasi Tingginya Jumlah Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas". Judul ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah tenaga kerja ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas, yang mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peranan dalam mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan instansi-instansi lain dalam mengatasi permasalahan TKI ilegal di Kabupaten Sambas. Peranan dinas menjadi salah satu hal yang penting dalam mengatasi permasalahan masyarakat asal Kabupaten Sambas yang lebih memilih bekerja sebagai TKI ilegal ke Malaysia walaupun memiliki resiko keselamatan dan keamanan yang rendah dibandingkan bekerja melalui perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah. Hingga saat ini, angka masyarakat asal Kabupaten Sambas yang bekerja sebagai TKI ilegal masih berada di angka yang sangat tinggi dikarenakan banyak faktor yang menjadi penghambat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menekan angka keberangkatan TKI ilegal.

Rumusan masalah yang diteliti yaitu "Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah tenaga kerja ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas?". Masih ditemukan hambatan dan tantangan dalam mengatasi fenomena masyarakat Kabupaten Sambas yang memilih bekerja sebagai TKI ilegal ke Malaysia salah satunya adalah proses administrasi yang memakan waktu sehingga calon TKI lebih memilih keberangkatan yang lebih instan.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah TKI ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas. Kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah TKI ilegal di Kabupaten Sambas adalah kurangnya koordinasi dinas dengan desa-desa melalui kecamatan. Kurangnya koordinasi ini membuat dinas kesulitan dalam memonitoring masyarakat desa melalui kecamatan dalam hal ketenagakerjaan migran. Penyebab dari hal ini adalah masih belum ada program yang teregulasi tentang koordinasi dinas dengan kecamatan sehingga koordinasi kebanyakan dilakukan setelah adanya kasus. Kurangnya koordinasi mengakibatkan kurangnya sosialisasi yang sampai ke masyarakat desa terutama masyarakat daerah pedalaman yang masih beranggapan bahwa bekerja sebagai TKI ilegal bukanlah sebuah masalah besar. Perkembangan media sosial menjadi salah satu tantangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena media sosial dimanfaatkan oleh calo untuk menyebarkan informasi perekrutan kerja. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus dapat melebihi calo dalam memanfaatkan media sosial, tetapi hingga saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya memanfaatkan *Facebook* sebagai media informasi. Persoalan-persoalan ini mengakibatkan masih banyaknya masyarakat asal Kabupaten Sambas yang bekerja sebagai TKI ilegal di Malaysia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian adalah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah TKI ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas atau yang mewakilkan, Camat Sambas atau yang mewakilkan, Camat Sajingan Besar atau yang mewakilkan, Kepala Polresta Kabupaten Sambas atau yang mewakilkan, Masyarakat yang pernah bekerja sebagai TKI melalui jalur resmi, Masyarakat yang pernah bekerja sebagai TKI melalui jalur ilegal, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kabupaten Sambas dan Agen/Calo Ilegal yang memberangkatkan calon TKI. Teori yang digunakan adalah indikator peran pemerintah yang dilihat berdasarkan tiga peranan, yaitu peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator, dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan teori Ryass Rasyid dalam hal peran pemerintah sebagai regulator yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sudah memiliki peraturan yang mengatur peranan dinas tentang pekerja migran Indonesia, yaitu Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tepatnya pada Pasal 18 yang menjelaskan tugas dan fungsi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penanganan TKI ilegal belum terdapat program yang mengatur secara sistematis koordinasi antar instansi terutama dengan kecamatan. Dalam hal peran pemerintah sebagai dinamisator, sosialisasi terkait TKI ilegal sudah dilakukan di 19 kecamatan di Kabupaten Sambas baik itu sosialisasi dari dinas langsung ataupun dari pihak-pihak lain, tetapi sosialisasi tidak sepenuhnya efektif untuk membuat masyarakat Kabupaten Sambas tidak bekerja

sebagai TKI ilegal dikarenakan faktor ekonomi dan persyaratan yang memakan waktu berbulan-bulan. Mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini memfasilitasi sarana informasi terkait ketenagakerjaan migran di media sosial masih terbatas di platform *Facebook*, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibawah Kementerian Ketenagakerjaan telah memfasilitasi aplikasi SIAPKERJA yang dapat digunakan untuk mencari informasi lowongan kerja baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

Saran yang peneliti berikan bermula dari peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat program yang terstruktur dan terukur tentang koordinasi sebagai upaya pencegahan terjadinya pengiriman TKI ilegal. Dengan adanya program terstruktur dan terjadwal, koordinasi dapat berjalan tanpa harus menunggu adanya kasus dan lebih terstruktur kegiatan yang akan dilakukan selama koordinasi berlangsung. Berkenaan dengan peran pemerintah sebagai dinamisator, sosialisasi tidak sepenuhnya mampu menggerakkan masyarakat untuk tidak bekerja sebagai TKI ilegal sehingga diperlukan cara lain seperti memangkas waktu proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi komputer dalam proses pemberkasannya. Terakhir, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih memperluas akun media sosial guna menyebarluaskan informasi tentang bahaya bekerja sebagai TKI ilegal dan memanfaatkan komunitas TKI Kabupaten Sambas di internet untuk menyebarkan informasi.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Imelda Yulianti
Nomor Mahasiswa	: E1031211079
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengatahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Imelda Yulianti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

"Mereka merencanakan, dan Allah merencanakan. Dan Allah adalah sebaik-baik perencana."

(Ali Imran: 54)

"Bukan gagal, hanya rencana Allah yang lebih baik dari harapan kita hari ini."

(Imelda Yulianti)

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana dengan rahmatnya memberikan petunjuk serta kemudahan dan juga kekuatan kepada penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.
2. Diri sendiri, Imelda Yulianti. Terima kasih sudah membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu menyelesaikan tanggung jawab hingga akhir. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan berhenti. Semoga dengan ilmu yang didapatkan dapat memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.
3. Cinta pertamaku, Ayahanda Raimondus Benison. Sosok yang mengajarkan penulis apa itu ketulusan dan rasa sabar, yang selalu menjadi 911 penulis dari awal hingga akhir. Beliau bukanlah manusia sempurna tetapi beliau adalah ayah yang sempurna bagi penulis.

4. Bidadari duniaku, Ibunda Mariatik. Beliau adalah ibu yang sangat perhatian, yang lebih mementingkan keluarga dibandingkan diri sendiri. Sosok yang tidak pernah henti mendoakan keberhasilan penulis hingga di titik ini.
5. Adikku tersayang, Eko Lukman atau Dedek Zikri. Sumber kekuatan penulis ketika lelah melalui canda tawanya. Melalui senyum dan pelukannya, penulis merasa dunia lebih bewarna karena kehadirannya.
6. Terima kasih untuk keluarga besar penulis yang selalu mengulurkan tangan dan memberikan motivasi serta dukungan selama ini.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Tingginya Jumlah TKI Ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas. Pada kesempatan yang telah diberikan ini, atas proses penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ir. Ida Rochmawati, Msi selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan penelitian ini. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bima Sujendra, S.I.P, M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan pendampingan yang tulus, tanggapan yang bijak, serta saran-saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.

Dalam proses penulisan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang turut serta membantu, baik dalam hal dukungan, semangat dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar di lingkungan kampus yang inspiratif dan memotivasi dibawah kepemimpinannya. Hal ini menjadi pendukung terbesar penulis selama perjalanan akademis.
2. Dr. Ira Patriani, S.I.P, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi yang telah memberikan dukungan, fasilitas, dan arahan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Bima Sujendra, S.I.P, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bimbingan yang berharga selama proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini. Kepemimpinan dan dedikasi Bapak/Ibu sangat memberikan motivasi bagi penulis dan seluruh mahasiswa untuk terus berkembang dalam dunia akademik.
4. Dr. Dedi Kusnadi, M.Si selaku Dosen Penguji Utama atas waktu, perhatian, dan evaluasi yang mendalam selama proses ujian skripsi. Saran, kritik, dan masukan yang Bapak/Ibu berikan telah menjadi bagian penting dalam menyelesaikan isi dan kualitas skripsi ini.
5. Indah Sulisdiani, SH, M.Si selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan masukan, pertanyaan kritis, serta penilaian objektif yang sangat membantu dalam proses penyempurnaan isi skripsi ini. Tanggapan dan saran yang diberikan telah menjadi masukan yang sangat berarti bagi pengembangan kualitas karya ilmiah ini.

6. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis sejak awal perjalanan akademis penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staff s Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan, mempermudah dan membantu selama perkuliahan.
8. Seluruh staf Bidang Pelatihan dan Penempatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.
9. Camat Kecamatan Sambas yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.
10. Camat Kecamatan Sajingan Besar yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.
11. Bareskrim Polri yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.
12. Kepala Cabang P3MI PT. Arwana Citra Lestari Kabupaten Sambas yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.
13. Anggota Jejaringan Calo yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.

14. Masyarakat asal Kabupaten Sambas yang bekerja di Malaysia sebagai TKI resmi yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.
15. Masyarakat asal Kabupaten Sambas yang bekerja di Malaysia sebagai TKI ilegal yang telah bersedia dan meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk mempermudah penulisan skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat sejak masa putih biru, Sabila, Erika, Salsa yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini−dari bangku SMP hingga saat ini.
17. Seseorang yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Selalu menjadi tempat cerita dan memberi kepercayaan diri kepada penulis.
18. Teman-teman di kampung halaman, Tari dan Salwa yang telah membantu dan menemani penulis selama proses penelitian.
19. Sahabat sepermainan, Unuy yang selalu mendengar dan memberi semangat kepada penulis.
20. *Followers* di *second account Instagram* penulis yang selalu setia membaca dan mendengar keluhan penulis.
21. Teman-teman diperkuliahan, Rika, Suci, Aryani yang telah menjadi keluarga di perantauan.
22. Rekan keluarga GYOSEI dan MAJELIS TAKLIM AN-NUR yang telah menemani dan memberi dukungan dari awal masa perkuliahan hingga sekarang.

23. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini.

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan tulisan yang sederhana ini dengan sebaik mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis bersedia menerima kritikan dan saran agar dapat menyempurnakan tulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tulisan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk siapapun yang membacanya diwaktu yang akan datang.

Pontianak, 10 Juli 2025

Imelda Yulianti
NIM. E1031211079

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

RINGKASAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN ix

MOTTO DAN PERSEMBAHAN x

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR GAMBAR xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 12

1.3 Fokus Penelitian 13

1.4 Rumusan Masalah 14

1.5 Tujuan Penelitian 13

1.6 Manfaat Penelitian 13

1.6.1 Manfaat Teoritis 13

1.6 .2 Manfaat Praktis 14

BAB II TINJAUN PUSTAKA 16

2.1 Definisi Konsep 16

2.1.1 Peran 16
2.1.2 Pemerintah 17
2.1.3 Peran Pemerintah 18
2.1.4 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 19
2.2 Teori 21
2.2.1 Peran 21
2.2.2 Peran Pemerintah Daerah 22
2.2.3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 26
2.4 Alur Pikir Penelitian 28
2.5 Pertanyaan Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Langkah-langkah Penelitian 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 34
3.3.1 Lokasi Penelitian 34
3.3.2 Waktu Penelitian 35
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 35
3.4.1 Subjek Penelitian 35
3.4.2 Objek Penelitian 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36
3.5.1 Wawancara 36
3.5.2 Observasi 38

3.5.3 Dokumentasi 38
3.6 Alat Pengumpulan Data 39
3.7 Analisis Data 40
3.7.1 Keabsahan Data 40
3.7.2 Teknik Analisis Data 42
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 45
4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sambas 45
4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Sambas 46
4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 46
4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 47
4.2.3 Jumlah Tenaga Kerja Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan 49
4.3 Kondisi Geografis Kecamatan Sambas 50
4.4 Kondisi Geografis Kecamatan Sajingan Besar 53
4.5 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas 54
BAB V PEMBAHASAN 58
5.1 Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Tingginya Jumlah Tenaga Kerja Ilegal Ke Malaysia Di Kabupaten Sambas 58
5.2 Peran Pemerintah Sebagai Regulator 60
5.3 Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator 64
5.4 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator 74
BAB VI PENUTUP 81

6.1 Kesimpulan 81

6.2 Saran 83

6.3 Keterbatasan Penelitian..... 85

DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data TKI Legal Kabupaten Sambas Tahun 2023 6

Tabel 1.2 Data TKI Legal Kabupaten Sambas Tahun 2024 6

Tabel 1.3 Data Penerima Layanan Kepulangan TKI Bermasalah 7

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Rencana Penelitian 35

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2024 47

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Kab. Sambas Menurut Jenjang Pendidikan..... 48

Tabel 4.3 Tenaga Kerja Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2024..... 49

Tabel 4.4. Nama Desa dan Dusun di Kec. Sambas, 2023..... 51

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kec. Sambas, 2023..... 52

Tabel 4.6 Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kec. Sajingan Besar, 2022 54

Tabel 5.1 Jumlah Penanganan Kasus TPPO di Kabupaten Sambas 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian..... 30

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Disnakertrans Kab. Sambas 55

Gambar 5.1 Rapat Diseminasi Prosedur Penempatan PMI..... 65

Gambar 5.2 Peserta KKL Magister Ilmu Ekonomi UNTAN dan Camat Sajingan Besar..... 68

Gambar 5.3 Media Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas .. 76

Gambar 5.4 Aplikasi dan Website SIAPKERJA 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menembus batas antar negara dan melakukan migrasi bahkan antar benua sekalipun. Fenomena migrasi ini bukanlah hal yang baru, tetapi dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi semakin memudahkan orang-orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Fenomena tersebut di sisi lain dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mengadu nasib dengan bekerja di negara lain. Untuk menjelaskan fenomena ini dikenal dengan migrasi internasional tenaga kerja yang dapat diartikan sebagai perpindahan atau pergerakan seseorang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan (Setiawan 2017). Walaupun demikian pengiriman pekerja ke luar negeri bukanlah yang pertama terutama di Indonesia karena sudah diberlakukan sejak masa kolonial Belanda.

Penduduk Indonesia yang kian bertambah tiap tahun tetapi tidak diikuti dengan potensi sebagai tenaga ahli karena masih kurangnya pendidikan dan lapangan pekerjaan membuat sebagian orang kalah dalam bersaing di negaranya sendiri. Mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di Indonesia memilih untuk bekerja di negara lain sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Banyaknya masyarakat yang memilih menjadi TKI membuat Indonesia menjadi negara dengan sumber tenaga kerja migran internasional terbanyak di Asía Tenggara. Pada tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia

berada pada urutan kedua pengirim pekerja migran di Asia Tenggara (Perwitasari 2023).

Jumlah total pekerja migran Indonesia mencapai 4,5 juta orang, dengan persentase perempuan sebesar 70% bekerja sebagai asisten rumah tangga dan lainnya, sedangkan pekerja migran pria sebesar 30% yang bekerja disektor pertanian, bangunan, transportasi dan jasa. Kebanyakan dari mereka memilih bekerja di luar negeri karena upah yang diberikan lebih memuaskan dibandingkan bekerja di Indonesia. Masyarakat yang bekerja di luar negeri memiliki sisi positif yaitu dapat mengurangi angka pengangguran, tetapi di sisi lain pekerja migran rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi (Jurnal Depnaker, Data Penempatan TKI).

Perbandingan gaji yang ditawarkan sebagai TKI jauh lebih besar dibandingkan dengan gaji ketika bekerja di Indonesia. Jika dibandingkan gaji ART khususnya di Kalimantan Barat yang berkisar 1,2 juta - 1,5 juta dengan gaji ART di Arab Saudi yang bisa mencapai 5,5 juta tentu terlihat selisih besar di antara tawaran gaji yang diberikan. Perbedaan gaji yang ditawarkan tentu membuat sebagian masyarakat memilih mengadu nasib di negara orang demi kesejahteraan keluarga di rumah.

Terdapat dua jenis pekerja migran di Indonesia, yaitu pekerja migran legal dan pekerja migran ilegal. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Untuk bekerja ke luar negeri, calon TKI

harus memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri baik itu di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi.

Melihat fenomena banyaknya masyarakat yang memilih bekerja sebagai tenaga inigran tentu mendorong pemerintah untuk menyediakan lembaga agar pengiriman pekerja migran lebih terakomodir dengan baik. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga swasta ataupun lembaga resmi pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tersebar di setiap Kabupaten di Indonesia. Dengan dibentuknya dinas terkait, pemerintah berharap para TKI dapat dilindungi secara hukum untuk menghindari hal-hal buruk selama berkerja di luar negeri dan penyebaran data pekerja migran dapat dipantau oleh pemerintah.

Calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri harus melalui lembaga resmi yang telah disediakan dan melewati serangkaian prosedur penempatan. Kabupaten Sambas sendiri memiliki lembaga resmi dari pemerintah yang bertanggung jawab atas keberangkatan TKI yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati No 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas tepatnya pada Pasal 18.

Prosedur keberangkatan TKI secara resmi memiliki beberapa alur tahapan antara lain pendaftaran, seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan perjanjian penempatan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, pengurusan visa kerja, pelaksanaan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan), penandatanganan perjanjian kerja, dan pemberangkatan. Dokumen yang harus disiapkan untuk memenuhi syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia antara lain:

1. KTP Elektronik dan Kartu Keluarga.
2. Surat keterangan status perkawinan.
3. Surat izin suami, istri, izin orang tua atau wali yang diketahui Kepala Desa atau Lurah.
4. Sertifikat kompetensi kerja.
5. Surat keterangan sehat.
6. Kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Para calon TKI juga harus melewati dua tahapan seleksi, yaitu tahapan seleksi administrasi berupa verifikasi dokumen yang telah diserahkan dan tahapan seleksi teknis yang disesuaikan dengan permintaan negara, misalnya ujian bahasa dan ujian keterampilan/keahlian. Apabila calon TKI dinyatakan lulus kedua tahapan seleksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan psikologi oleh lembaga tekait, pembuatan paspor dan terakhir tanda tangan perjanjian penempatan yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak.

Banyaknya syarat dan berkas yang harus disiapkan dan biaya yang relatif mahal membuat beberapa calon TKI lebih memilih jalur keberangkatan ilegal karena dianggap lebih memudahkan. Jalur ilegal lebih dipilih oleh calon TKI karena cepat secara administrasi dan tidak memiliki batas minimal usia walaupun tidak jelas siapa yang bertanggung jawab akan keberangkatan TKI tersebut. Mereka hanya perlu menyiapkan pasport tanpa perlu dokumen lain dan pelatihan yang panjang. Urusan administrasi pada jalur ilegal lebih cepat karena calon TKI dapat langsung bekerja pada *user* di luar negeri tanpa harus melewati serangkaian seleksi ataupun pembengkalan.

Tenaga kerja migran yang berangkat secara ilegal sangat rentan terhadap kejahatan-kejahatan karena tidak adanya badan yang melindungi mereka. Penempatan kerja oleh para calo biasanya merupakan tempat kerja yang rentan akan ekspoilatasi baik dalam bentuk pelanggaran hak-hak kemanusiaan seperti *human trafficking* ataupun mendapat perlakuan buruk di negara tempat TKI tersebut bekerja (Sholehan 2016). Apabila sudah terjadi kejahatan kepada TKI ilegal, maka pemerintah akan kesulitan untuk membantu.

Hingga gini jumlah TKI ilegal di Kabupaten Sambas masih termasuk dalam angka yang tinggi sehingga membuat Kabupaten Sambas menjadi kabupaten dengan pengirim TKI tertinggi ke Malaysia (Sabani, Mukhlis, and Nur 2021). Keberangkatan TKI secara ilegal tidak akan terdata secara administrasi sehingga pemerintah kesulitan untuk mendapatkan data yang pasti berapa jumlah TKI ilegal di Malaysia secara keseluruhan. Sejauh ini pemerintah dalam hal ini BP3MI Kalimantan Barat yang bertanggung jawab terhadap pemulangan TKI hanya dapat mendata TKI non-prosedural apabila terdapat pengaduan masalah.

Berikut merupakan data TKI yang berangkat secara resmi atau sesuai prosedur dan terdata oleh pemerintah terhitung dari tahun 2023 sampai tahun 2024.

Tabel 1.1 Data TKI Legal Kabupaten Sambas Tahun 2023

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak Sekolah/Tidak Tamat Sekolah	9	8	17
Sekolah Dasar	41	16	57
Sekolah Menengah Pertama	60	20	80
Sekolah Menengah Atas	46	38	84
Sekolah Menengah Kejuruan	13	14	27
Diploma I (D.I)	0	0	0
Diploma II (D.II)	0	0	0
Diploma III (D.III)	0	0	0
Strata I (S.I)	1	1	2
Strata II (S.II)	0	0	0
Strata III (S.III)	0	0	0
Pendidikan Profesi	0	0	0
Jumlah	170	97	**267**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas

Tabel 1.2 Data TKI Legal Kabupaten Sambas Tahun 2024

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
Tidak Sekolah/Tidak Tamat Sekolah	6	10	16
Sekolah Dasar	18	10	28
Sekolah Menengah Pertama	30	14	44
Sekolah Menengah Atas	24	23	47
Sekolah Menengah Kejuruan	20	14	34
Diploma I (D.I)	0	0	0
Diploma II (D.II)	0	0	0
Diploma III (D.III)	0	0	0
Strata I (S.I)	0	0	0
Strata II (S.II)	0	0	0
Strata III (S.III)	0	0	0
Pendidikan Profesi	0	0	0
Jumlah	**98**	**71**	**169**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas

Berikut adalah data TKI non-prosedural (ilegal) asal Kabupaten Sambas yang telah dipulangkan setelah adanya pengaduan masalah dari tahun 2022 sampai tahun 2024.

Tabel 1.3 Data Penerima Layanan Kepulangan TKI Bermasalah

Status Kepulangan	2022	2023	2024
Repatriasi (KBRI/KJRI)	17	17	19
Deportasi	566	802	1.045
Sakit	1	3	1
Meninggal Dunia	27	25	28
Pencegahan	18	0	0
Terlantar	0	0	0
TOTAL	**629**	**847**	**1.093**

Sumber: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat

Data di atas adalah data pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal dan sudah dipulangkan. Pada status kepulangan repatriasi (KBRI/KJRI), seorang TKI kembali ke Indonesia melalui pengaduan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang kemudian pemulangan tersebut dibantu oleh KBRI atau KJRI. Untuk status kepulangan deportasi sebagaimana pengertian dari deportasi sendiri yaitu pemulangan secara paksa yang dalam hal ini proses pemulangannya difasilitasi oleh BP3MI. Status kepulangan pencegahan yang dimaksud adalah pemerintah, dalam hal ini kepolisian, mencegah penyeludupan TKI selama proses keberangkatan, biasanya pencegahan ini terjadi di daerah perbatasan.

Jika dibandingkan antara jumlah TKI yang berangkat melalui prosedur resmi dengan TKI yang sudah dipulangkan, masalah pekerja migran ilegal menjadi

masalah yang cukup serius untuk di atasi. TKI yang berangkat secara resmi pada tahun 2023 berjumlah 267 orang dan tahun 2024 sebanyak 169 orang, sedangkan TKI ilegal yang dipulangkan setelah adanya pengaduan berjumlah 629 orang pada tahun 2022, 847 orang pada tahun 2023, dan 1.093 orang pada tahun 2024. TKI ilegal hanya dapat didata apabila ada pengaduan permasalahan sehingga kemungkinan masih banyak TKI ilegal yang sedang bekerja di Malaysia dan belum ketahuan. Besarnya selisih angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sambas masih belum mampu mengatasi fenomena keberangkatan calon pekerja migran secara ilegal.

Masyarakat yang memilih bekerja sebagai TKI biasanya adalah masyarakat dengan ekonomi ke bawah sehingga kebanyakan dari mereka kurang teredukasi tentang lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap keberangkatan calon TKI. Kurangnya edukasi ini juga didukung dengan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terutama oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrası di Kabupaten Sambas tentang bahaya bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Akibat dari masyarakat yang tidak teredukasi membuat tidak adanya kesadaran masyarakat akan bahaya bekerja di luar negeri tanpa memikirkan resiko keselamatan selama bekerja.

Tingkat pendidikan yang rendah didukung dengan lapangan kerja di Kabupaten Sambas yang tidak sesuai antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Masyarakat dengan pendidikan rendah lebih memilih bekerja ke Malaysia karena gaji yang ditawarkan lebih besar untuk tingkat pendidikan yang rendah. Keterbatasan biaya untuk bersekolah juga turut

mendukung masyarakat bekerja ke Malaysia dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga.

Kurangnya pengawasan dan sosialisasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disebabkan oleh letak dinas yang hanya ada di ibukota Kabupaten Sambas sehingga sulit diakses oleh para calon TKI yang tinggal jauh dari ibukota Kabupaten Sambas. Keterbatasan anggaran juga membuat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kesulitan untuk melakukan pengawasan secara langsung ke setiap daerah.

Penyebaran informasi secara tidak resmi juga dapat berasal dari sesama masyarakat yang sudah terlebih dahulu bekerja sebagai TKI ilegal atau sebagian besar berasal dari oknum-oknum calo yang datang langsung kepada calon TKI sehingga mereka teredukasi dengan cara ilegal bukan melalui jalur yang resmi. Hal ini juga turut didukung dengan proses keberangkatan TKI ilegal yang cepat dan tanpa syarat.

Masyarakat yang melihat adanya peluang bekerja dengan gaji lebih besar dan tidak adanya edukasi dari pemerintah tentang bahaya bekerja secara ilegal membuat penyebaran TKI ilegal di Kabupaten Sambas menjadi masalah dari tahun ke tahun. Mereka tidak memikirkan resiko keselamatan karena keterbatasan informasi dari pemerintah.

Perkembangan informasi tentang pekerjaan sebagai TKI ilegal didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Calo-calo TKI ilegal memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk menyebarkan jejaringan mereka. Di lain sisi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum memanfaatkan media

sosial sebaik yang dilakukan oleh calo TKI ilegal. Hingga saat ini, akun media sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya ada di satu platform yaitu *Facebook* yang belum dimanfaatkan untuk menyebarkan pemahaman tentang bahaya keberangkatan sebagai TKI ilegal.

Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang didukung dengan keterbatasan pengetahuan membuat calon TKI sering tertipu oleh calo untuk bekerja di luar negeri tanpa mengikuti segala prosedur yang telah diatur. Hal ini disebabkan karena desakan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mereka tidak sempat memikirkan resikonya. Persyaratan yang berbelit dan proses yang memakan waktu serta biaya yang mahal menjadikan masalah ini menjadi sangat memprihatinkan karena apabila terus dibiarkan akan membahayakan keselamatan TKI yang bekerja secara ilegal.

Kondisi geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia juga menjadi salah satu faktor banyaknya penyeludupan pekerja migran secara ilegal. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia di Kabupaten Sambas adalah Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh, lebih tepatnya di Aruk dan Temajuk. Hingga saat ini Pos Lintas Batas Negara (PLBN) hanya ada di Aruk, sedangkan di Temajuk belum ada PLBN yang dibangun. Dengan tidak adanya PLBN yang merupakan *check point* di perbatasan negara guna untuk mengawasi dan melayani perlintasan orang dan barang di Temajuk, semakin memudahkan penyeludupan masyarakat untuk bekerja secara ilegal di Malaysia.

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengatasi fenomena sosial rendahnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sambas dengan melakukan pelatihan seperti budidaya ikan lele, pemberian modal gerobak untuk UMKM di depan taman daerah, dan memanfaatkan daerah-daerah yang berpotensi menjadi daerah wisata melalui program Ekonomi Kreatif (Ekraf).

Peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terutama Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, berkaitan dengan fungsi yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, dan adapun upaya pemerintah daerah dalam hal ini Disnakertrans untuk mengurangi tingkat TKI ilegal yaitu dengan melakukan langkah-langkah diantaranya; 1) Melakukan sosialisasi di kecamatan dan desa. Sosialisasi dilakukan dengan harapan masyarakat tidak akan termakan informasi yang disampaikan oleh calo-calo ilegal. Namun, keterbatasan dana yang tidak cukup dibandingkan dengan jumlah kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Sambas membuat pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan di kecamatan tertentu dengan potensi TKI ilegal tertinggi. Materi sosialisasi terkait prosedur yang terkesan berbelit-belit dan memakan banyak biaya serta waktu membuat masyarakat mengacuhkan prosedur yang sudah jelas dan lebih memilih cara yang instan dengan alasan kurang memahami tahapan prosedur keberangkatan secara legal. 2) Melakukan koordinasi dengan kecamatan terkait pengawasan calon TKI. Mengingat bahwa jumlah desa dan kecamatan di Kabupaten Sambas sangat banyak, tentu Disnakertrans Kabupaten Sambas akan sangat kewalahan untuk melakukan pengawasan di setiap

daerah. Koordinasi dengan setiap kecamatan akan sangat membantu Disnakertrans untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang akan bekerja sebagai TKI. Hanya saja sampai sekarang koordinasi pengawasan ini belum berjalan secara optimal melihat angka TKI ilegal lebih tinggi dibanding angka TKI legal.

Berdasarkan dengan apa yang telah dirincikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Mengatasi Tingginya Jumlah Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas".

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah adalah langkah awal dari suatu kegiatan penulisan, yaitu untuk mengetahui latar belakang kelemahan-kelemahan yang dihadapi serta masalah-masalah yang timbul dalam sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, masalah tersebut diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui koordinasi dengan desa-desa melalui kecamatan setempat.
2. Masih kurangnya sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai prosedur keberangkatan TKI secara resmi dan bahaya migrasi ilegal.
3. Kurangnya pemanfaatan media sosial atau *website* sebagai kanal utama penyebaran informasi bahayanya bekerja sebagai imigran ilegal.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang ada cukup luas, sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini akan difokuskan pada peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam fungsinya sebagai koordinator keberangkatan calon TKI.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah "Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah tenaga kerja ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas?".

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah TKI ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya manajemen pemerintahan yang terkait dengan peran pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi tingginya jumlah TKI ilegal di Kabupaten Sambas khususnya yang bekerja di Malaysia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran sebagai bahan informasi dan evaluasi agar meningkatkan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengatasi Tingginya Jumlah Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran sebagai bahan informasi khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sambas.

3. Bagi Peneliti

   Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Mengatasi Tingginya Tenaga Kerja Ilegal ke Malaysia di Kabupaten Sambas.